

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tempat Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Wates



Gambar 1. Pengadilan Agama Wates

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Wates, 2013

Pengadilan Agama Wates merupakan peradilan tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Agustus 1961. Gedung Pengadilan Agama Wates yang berdiri di atas tanah seluas 840 m², luas bangunan 300 m², dan beralamatkan di Jalan Sugiman No. 25 Wates, Kulon Progo kini sudah menempati gedung baru yang beralamat di Jl. Raya Wates-Purworejo Km. 2,6 Wates Kulon Progo sejak 1 Januari 2013 (Dokumen Pengadilan Agama Wates, 2013).

Gedung Pengadilan Agama Wates terdiri atas dua lantai dan beberapa ruangan yang meliputi gedung lantai I, terdiri atas: lobi

sekaligus tempat tunggu pengunjung, ruang Informasi, ruang panitera muda hukum, ruang mediasi, mushola untuk umum, ruang kepaniteraan, ruang tunggu pihak berperkara, ruang wakil panitera, ruang pembayaran panjar, ruangan kantor sub bagian keuangan, ruangan sub bagian kepegawaian, ruang sidang utama 1 ruangan, ruang sidang 1, dan kamar mandi. Sedangkan Gedung Lantai II, terdiri atas: ruang ketua pengadilan, ruang wakil ketua pengadilan, ruang para hakim, ruang pansek, ruang panitera pengganti, ruang jurusita, ruang arsip, ruang rapat, gudang, perpustakaan dan kamar mandi (Dokumen Pengadilan Agama Wates, 2013).

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Wates sejak awal berdirinya sampai sekarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Wates

No	Nama	Jabatan	Tahun Menduduki Jabatan
1.	K. Bachrudin	Ketua	1962-1972
2.	KH. Asro'i	Ketua	1972-1973
3.	Drs. Muhsinun	Ketua	1973-1981
4.	Drs. Mubandi Musyafir	Ketua	1981-1988
5.	Drs. Usman	Ketua	1988-1997
6.	Dra. Hj. Wardanah, SH.	Ketua	1997-2002
7.	Drs. Maslihan Saifurrozi, SH., MH.	Ketua	2004-2005
8.	Drs. H. Muhammad Darin, SH., MSI.	Ketua	2005-2008
9.	Drs. M. Badawi, SH., MSI.	Ketua	2008-2011
10.	Drs. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.	Ketua	2011-2013
11.	Drs. Yusuf, SH., MSI	Ketua	2013-sekarang

Sumber : Dokumen Pengadilan Agama Wates, 20 November 2013

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wates

Yurisdiksi Pengadilan Agama Wates meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan dan 87 desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wates

No	Kecamatan	Kelurahan
1.	Temon	Karangwuluh, Sindutan, Jangkaran, Janten, Palihan, Kebonrejo, Temon Kulon, Temon Wetan, Glagah, Kaligintung, Kalidengen, Demen, Plumbon, Kulur, Kedundang
2.	Wates	Wates, Giripeni, Triharjo, Ngestiharjo, Bendungan, Sogan, Kulwaru, Karangwuni
3.	Panjatan	Gotakan, Cerme, Krembangan, Pleret, Bugel, Tayuban, Depok, Kanoman, Bojong, Garongan, Panjatan
4.	Galur	Tirtorahayu, Pandowan, Brosot, Kranggan, Nomporejo, Banaran, Karangsewu
5.	Girimulyo	Giripurwo, Pendoworejo, Jatimulyo, Purwosari
6.	Kalibawang	Banjaroyo, Banjarharjo, Banjarsari, Banjararum
7.	Kokap	Hargotirto, Kalirejo, Hargowilis, Hargomulyo, Hargorejo
8.	Lendah	Ngentakrejo, Gulurejo, Sidorejo, Jatirejo, Bumirejo, Wahyuharjo
9.	Nanggulan	Kembang, Jatisarono, Tanjungharjo, Wijimulyo, Banyuroto, Donomulyo
10.	Pengasih	Pengasih, Kedungsari, Margosari, Sendangsari, Karangsari, Tawang Sari, Sidomulyo
11.	Samigaluh	Gerbosari, Kebonharjo, Pagerharjo, Ngargosari, Banjarsari, Sidoharjo, Purwoharjo
12.	Sentolo	Sentolo, Banguncipto, Kaliagung, Salamrejo, Sukoreno, Demangrejo, Srikayangan, Tuksono

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Wates, 20 November 2013

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wates

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Wates diperoleh dokumen yang memuat tentang visi dan misi Pengadilan Agama Wates yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Selaras dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni “Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung”.

b. Misi

Adapun Misi Pengadilan Agama Wates yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian dan independensi Badan Peradilan;
- 2) Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan sistim pelayanan yang cepat dan berkualitas melalui peningkatan website dan SIADPA-plus;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan;
- 5) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Wates.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates

Struktur organisasi Pengadilan Agama Wates terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan , Kepala Urusan Umum, Pejabat Fungsional Hakim, Pejabat Fungsional Panitera Pengganti, Pejabat Jurusita/Jurusita Pengganti dan Staf.

Dari struktur organisasi di atas maka akan diuraikan mengenai tugas masing-masing jabatan, yaitu sebagai berikut:

a. Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama

Wates dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Wakil Ketua

Wakil Ketua bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Wates dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris bertugas membantu pimpinan dalam melaksanakan tugasnya, memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam hal-hal memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan pelayanan di bidang administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Wates.

d. Wakil Panitera

Wakil Panitera bertugas membantu panitera dalam memimpin pelaksanaan tugas di bidang administrasi perkara yang meliputi: gugatan, permohonan dan hukum.

e. Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris bertugas membantu panitera/sekretaris dalam pelaksanaan tugas di bidang administrasi kesekretariatan, yakni bagian kepegawaian, keuangan, dan perencanaan umum.

f. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka

panjang, pelaksanaannya, pengorganisasiannya serta membantu panitera dalam penyelenggaraan administrasi perkara dan pengelolaan di bidang perkara gugatan.

g. Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, pengorganisasiannya serta membantu panitera dalam penyelenggaraan administrasi perkara dan pengelolaan di bidang perkara permohonan.

h. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, pengorganisasiannya serta membantu panitera dalam penyelenggaraan administrasi perkara dan pengelolaan di bidang perkara hukum.

i. Kepala Urusan Kepegawaian

Kepala Urusan Kepegawaian bertugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian meliputi pengadaan/pengembangan, kepangkatan/peningkatan dan penata usaha kepegawaian.

j. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan

Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan bertugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan urusan keuangan meliputi: perencanaan, penggunaan, pembukuan dan pelaporan.

k. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum bertugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan bidang urusan umum dan pengadaan barang dan jasa pada Pengadilan Agama Wates.

l. Hakim

Hakim bertugas memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dalam tingkat pertama, melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan Agama Wates.

m. Jurusita

Jurusita bertugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua/Ketua Majelis meliputi: melaksanakan pemanggilan kepada pihak yang berperkara, melaksanakan pemanggilan para saksi-saksi ahli, menyampaikan pemberitahuan amar putusan kepada pihak yang berperkara yang tidak hadir di persidangan (Dokumen Pengadilan Agama Wates, 2013).

5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Wates

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. Infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah. Di samping tugas pokok dimaksud tersebut, Pengadilan Agama Wates mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan ti;
- d. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,

keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006);

- e. Fungsi lainnya: Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan, yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan, Pengadilan Agama Wates menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdiri dari:

- a. SOP Bagian Perkara
- b. SOP Bagian Kesekretariatan:
 - 1) SOP Urusan Kepegawaian
 - 2) SOP Urusan Keuangan
 - 3) SOP Urusan Umum

- c. SOP Manajemen Peradilan (Dokumen Pengadilan Agama Wates, 2013).

B. Alasan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Wates

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akta nikah merupakan bukti otentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang (Zainuddin Ali, 2006: 29). Misalnya, suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara kenyataannya ia mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak isteri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan Agama.

Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu agar anak dapat memporelah hak-haknya. Tanpa adanya akta nikah, upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Zainuddin Ali, 2006: 29). Hal ini dibenarkan oleh Bapak Ikhsanuddin, S.H, bahwa untuk dapat melakukan suatu gugatan atas sengketa dalam perkawinan bukti nikah yang diakui oleh Pengadilan Agama adalah akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) seperti yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan para pihak untuk memperoleh pengesahan nikah walaupun tidak memiliki akta nikah yang diakibatkan oleh tidak dilakukannya perkawinan di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah atau perkawinan dilakukan di bawah tangan menurut hukum Islam (Wawancara dengan Bapak Ikhsanuddin, S.H, tanggal 18 Oktober 2013).

Apabila suatu kehidupan suami isteri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya sesuatu sebab, Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Ikhsanuddin, S.H, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah, dibuat atas dasar “Adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang”. Aturan pengesahan nikah tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian pada Pengadilan Agama Wates juga ditemukan adanya pengajuan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Wates dalam periode tahun 2011 - Juli 2013 terdapat 40 permohonan. Sebagai contoh adalah periode Januari-Desember 2012 terdapat 15 permohonan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah perkara masuk dan

diputus di Pengadilan Agama Wates tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Perkara yang Masuk dan Diputus di Pengadilan Agama Wates Tahun 2012

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Diputus
1	Izin Poligami	5	4
2	Pembatalan Perkawinan	1	-
3	Wali Adhol	4	3
4	Cerai Gugat	453	358
5	Cerai Talak	199	190
6	Gugatan Harta Bersama	1	1
7	Penguasaan Anak	1	-
8	Perwalian	2	2
9	Asal Usul Anak	2	1
10	Itsbat nikah	15	16
11	Dispensasi kawin	62	60
12	Kewarisan	3	2
13	Penolakan Perkawinan oleh PPN	1	-
14	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	2	1
15	Gugatan Lain-lain	10	10
	Jumlah	761	648

Sumber: Dokumen Laporan Tahunan 2012 Pengadilan Agama Wates, diolah pada 26 November 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Wates pada periode tahun 2012 terdapat perkara yang masuk 761 perkara dan

perkara yang berhasil diputuskan adalah 648 perkara. Di dalam laporan tahunan 2012 Pengadilan Agama Wates terdapat 717 perkara yang dapat diselesaikan dengan rincian:

a. Perkara yang diputus	: 648
b. Perkara dicabut	: 40
c. Perkara ditolak	: 11
d. Perkara gugur	: 14
e. Perkara tidak diterima	: 2
f. Perkara dicoret dari register	: 2
<hr/>	
Jumlah	: 717

Kondisi ini menunjukkan tingginya perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama Wates. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari keseluruhan perkara yang ada di Pengadilan Agama Wates tersebut terdapat 15 perkara yang merupakan permohonan itsbat nikah dan ada 16 perkara itsbat nikah yang berhasil diputuskan. Hal ini dikarenakan 1 perkara merupakan sisa perkara pada tahun 2011 yang kemudian dapat diselesaikan pada tahun 2012.

Selanjutnya dapat pula dijelaskan bahwa yang menjadi alasan banyaknya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates yaitu:

1. Hilangnya akta nikah

Hilangnya akta nikah disebabkan karena adanya bencana alam seperti tanah longsor, kebakaran (Wawancara dengan Bapak Barwanto, S.H, pada tanggal 25 Oktober 2013). Apabila akta nikah

hilang maka dapat dimintakan duplikatnya ke kantor yang dulu mengeluarkannya. Jika kantor yang dahulu mengeluarkan tidak dapat membuat duplikatnya karena telah rusak atau hilang maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama. Jadi Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Wates dapat menerima dan membuatkan penetapan itsbat nikah karena hilangnya akta nikah. Di Pengadilan Agama Wates hilangnya akta nikah ini disebabkan karena adanya bencana alam. Kemudian Pemohon berusaha mendatangi KUA yang mengeluarkan akta nikah untuk mencari duplikat akta nikah namun setelah dicari di KUA juga tidak ditemukan atau telah hilang. Kemudian dari pihak KUA memberikan surat keterangan untuk dijadikan dasar atau alat bukti penyelesaian perkara itsbat nikah yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Wates.

Sebagai contoh mengenai alasan pengajuan permohonan itsbat nikah dikarenakan akta nikah hilang yaitu dalam perkara Nomor: 0049/Pdt.G/2012/PA.Wt “Bahwa Pemohon I sudah pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo, tetapi hilang”. Selanjutnya dalam perkara Nomor: 0462/Pdt.G/2011/PA.Wt “Bahwa Pemohon sudah pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, tetapi hilang”.

Melihat alasan permohonan itsbat nikah dikarenakan akta hilang seperti contoh di atas telah jelas terlihat bahwa hilangnya akta nikah

merupakan salah satu alasan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates. Akta nikah selain dipegang oleh suami isteri seharusnya di KUA juga ada duplikatnya. Akan tetapi, jika di KUA juga hilang atau tidak ada maka hal ini merupakan kesalahan atau kelalaian dari pihak KUA yang tidak seharusnya terjadi. Akta nikah merupakan bukti otentik adanya perkawinan maka sudah seharusnya dijaga dengan baik agar tidak hilang.

2. Mengesahkan status anak/untuk membuat akta kelahiran.

Itsbat nikah yang diajukan untuk mengesahkan status anak atau untuk membuat akta kelahiran di Pengadilan Agama Wates dilakukan oleh suami isteri atau salah satu dari mereka yang bertujuan untuk membuat akta kelahiran anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena perkawinan yang dilakukan Pemohon terjadi pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimungkinkan perkawinan belum dicatatkan atau telah dicatatkan namun akta nikah hilang, dan setelah dicari duplikat surat nikah di KUA setempat tidak ditemukan. Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates. Sebagai contoh mengenai alasan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates dikarenakan mengesahkan status anak untuk memperoleh warisan yaitu dalam perkara Nomor: 0038/Pdt.G/2012/PA.Wt.

Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dengan SUAMI PEMOHON I dari

Pengadilan Agama Wates guna dijadikan dasar hukum untuk pembuatan akta kelahiran anak-anak Pemohon I.

Selanjutnya dalam perkara Nomor: 0462/Pdt.G/2011/PA.Wt.

Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Wates, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon.

Selanjutnya dalam perkara Nomor : 0036/Pdt.P/2013/PA.Wt.

Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Wates guna membuat akta kelahiran anak;

Melihat alasan permohonan itsbat nikah dikarenakan untuk mengesahkan status anak atau untuk membuat akta kelahiran seperti contoh di atas jelas terlihat bahwa hal itu merupakan salah satu alasan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates. Alasan tersebut cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Wates. Membuat akta kelahiran juga dapat dilakukan tanpa adanya akta nikah, namun dalam akta kelahiran tidak tercantum nama ayah hanya ada nama ibu. Hal ini tentu saja sangat merugikan sang anak yang tidak dapat mendapatkan hak-haknya sebagai akibat hubungan nasab dengan ayahnya.

3. Mengurus pembagian warisan.

Itsbat nikah untuk mengurus pembagian warisan di Pengadilan Agama Wates tergolong banyak. Hal ini kebanyakan dilakukan oleh anak-anak dari orang tua yang pernikahannya akan diitsbatkan. Secara keseluruhan permohonan itsbat nikah ini disebabkan karena perkawinan terjadi pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimungkinkan perkawinan belum dicatatkan atau telah dicatatkan namun akta nikah hilang dan setelah dicari duplikat surat nikah di KUA setempat tidak ditemukan, maka mereka mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates. Sebagai contoh mengenai alasan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh warisan yaitu dalam perkara Nomor: 0023/Pdt.P/2013/PA.Wt.

“Bahwa PEMOHON saat ini sedang mengurus proses pensertifikatan hak waris dari Almarhum BAPAK HARJO DINOMI ALIAS SANDRIYO dengan ALMARHUM IBU SAWIYEM yang masih Letter C dan masih indung dengan Letter C atas nama Almarhum BAPAK KASAN DIMEJO ALIAS SANDRIYEM yang merupakan adik dari Almarhum BAPAK HARJO DINOMO ALIAS SANDRIYO di Balai Desa Bojong Kecamatan Panjatan dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulon Progo yang saat ini perkara waris ini belum bisa selesai dikarenakan pihak anak-anak dari Almarhum BAPAK KASAN DIMEJO ALIAS SANDRIYEM meminta pengesahan pernikahan dari Almarhum BAPAK HARJO DINOMI ALIAS SANDRIYO dengan Almarhumah IBU SAWIYEM. Hal ini dikarenakan, PEMOHON belum melengkapi alat bukti guna mendukung pengurusan pembagian hak Waris di Balaidesa Bojong dan BPN Kulon Progo oleh karena itu untuk memproses silsilah waris dari Balaidesa Bojong dan BPN Kulon Progo meminta kepada PEMOHON untuk mengurus Pengesahan nikah orang tua PEMOHON”.

Selanjutnya dalam perkara Nomor: 0314/Pdt.G/2013/PA.Wt

“Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ayah dan ibu Pemohon dari Pengadilan Agama Wates guna dijadikan dasar hukum untuk Pembuatan Akta Kelahiran guna mengurus pembagian warisan”.

Selanjutnya dalam perkara Nomor: 0506/Pdt.G/2012/PA.Wt

“Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah ayah dan ibu Pemohon dari Pengadilan

Agama Wates guna dijadikan dasar hukum untuk pembagian tanah”.

Melihat alasan permohonan itsbat nikah dikarenakan untuk mengurus pembagian warisan seperti contoh di atas jelas terlihat bahwa hal itu merupakan salah satu alasan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates. Alasan tersebut juga cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Wates. Hal tersebut dilakukan para pemohon dengan tujuan untuk menuntut hak-hak mereka agar mendapatkan warisan dari orang tuanya, yang tentu saja memerlukan bukti akta nikah dari pernikahan orang tuanya. Dengan dasar akta nikah tersebut mereka dapat membuat akta kelahiran yang dapat dijadikan sebagai bukti otentik bahwa mereka merupakan anak sah dan berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya.

Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu *fundamentum petendi* atau *posita* permohonan, pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon (M. Yahya Harahap, 2008: 33).

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Wates ditemukan bahwa sebagian besar yang mengajukan permohonan itsbat nikah adalah anak-anak dari orang tua yang pernikahannya akan

diitsbatkan. Hal ini dikarenakan pernikahan yang dilangsungkan orang tua mereka itu terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimungkinkan pada saat itu perkawinannya belum dicatatkan atau telah dicatatkan namun akta nikah telah hilang dan setelah dicari duplikat surat nikah di KUA setempat tidak ditemukan, maka mereka mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates. Alasan mereka mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut adalah untuk membuat akta kelahiran dan untuk mengurus pembagian warisan.

C. Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Wates

Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Wates sama halnya dengan perkara perdata lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tahapan atau langkah-langkah itsbat nikah yaitu dimulai dari pengajuan permohonan, penerimaan perkara, pemeriksaan dalam sidang, kesimpulan, dan keputusan hakim. Secara lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah

Pengajuan permohonan itsbat nikah ini berhak dilakukan oleh suami, isteri, anak, orang tua/wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu (Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 4). Di dalam pengajuan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh oleh

pemohon. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemohon yaitu:

- a. Pihak berperkara mendatangi kantor Pengadilan Agama Wates lalu menyerahkan surat permohonan itsbat nikah, minimal 2 (dua) rangkap ke Meja Pertama, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Surat pengantar dari Kelurahan setempat;
 - 2) Satu lembar foto copy surat nikah bermaterai Rp. 6.000,- cap pos;
 - 3) Satu lembar foto copy KTP (yang masih berlaku) bermaterai Rp. 6.000,- cap pos;
 - 4) Surat keterangan saksi nikah dari kelurahan setempat;
 - 5) Surat keterangan silsilah keluarga
- b. Petugas Meja Pertama memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Apabila pemohon tidak mampu membayar panjar biaya perkara, maka pemohon dapat mengajukan permohonan berpekara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat membawa Surat Keterangan Miskin (SKM) dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
- c. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat permohonan itsbat nikah kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

- d. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat permohonan itsbat nikah tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- e. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
- f. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
- g. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
- h. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat permohonan itsbat nikah tersebut.

- i. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat permohonan itsbat nikah sebanyak jumlah pemohon dan termohon (jika ada) ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- j. Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat permohonan itsbat nikah dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan itsbat nikah tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
- k. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat permohonan itsbat nikah yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara (Dokumen Pengadilan Agama Wates dan Wawancara dengan Bapak Barwanto, S.H pada tanggal 25 Oktober 2013).

Sebagai contoh mengenai permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates yang termasuk dalam perkara voluntair dapat dilihat pada uraian permohonan yang peneliti dapatkan dari hasil dokumentasi di Pengadilan Agama Wates, sebagai berikut:

Hal: Pengesahan Nikah

Wates, 14 Mei 2013
Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan
Agama Wates
Di Wates

Assalamu'alaikum wr.wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Ratiman alias Wongso Wiyono bin Womgso
Kartiko
Umur : 95 tahun
Agama : Islam

Pekerjaan : -
 Pendidikan : -
 Tempat tinggal : Dusun Diren Pedukuhan III RT. 012 RW. 006 Desa Pandowan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama : Nyami alias Ny Wongso Wiyono binti Karsodikromo
 Umur : 89 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : -
 Pendidikan : -
 Alamat : Dusun Diren Pedukuhan III RT. 012 RW. 006 Desa Pandowan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I, memberikan kuasa kepada Pemohon II untuk bertindak atas nama dirinya dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah Antara Ratiman dengan Nyami.

Adapun permohonan ini didasarkan pada dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut

1. Bahwa pada tahun 1942 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Karsodikromo (Bapak Pemohon II), dengan maskawin berupa uang sebesar 1100 gelo 5 sen;
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan persusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut yakni: Amat Kardi dan Arjo Sari, namun kedua saksi nikah tersebut telah meninggal dunia;
5. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Dusun Diren Pedukuhan III RT. 012 RW. 006 Desa Pandowan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, dan mendapat karunia 6 (enam) orang anak yakni:
 - Kuwat bin Ratiman, sudah meninggal sekitar tahun 1950
 - Semi binti Ratiman, sudah meninggal sekitar tahun 1952
 - Dalinah binti Ratiman, sudah meninggal tahun 2009

- Sriyati binti Ratiman, sekarang bekerja dan tinggal di Arab Saudi
 - Sudiarjo bin Ratiman, sekarang tinggal di Dusun Diren Pedukuhan III RT. 012 RW. 006 Desa Pandowan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo
 - Sugito bin Ratiman, sekarang tinggal di Dusun Diren Pedukuhan III RT. 012 RW. 006 Desa Pandowan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo
6. Bahwa selama perkawinannya, keduanya belum pernah bercerai maupun berpindah agama selain Islam (murtad) dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinannya;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, tetapi hilang;
 8. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data atau tidak tercatat tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sebagaimana keterangan KUA Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Nomor: KK.12.05.4/PW.01/139/2013, tanggal 10 Mei 2013;
 9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Wates guna membuat akta kelahiran anak;
 10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wates untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, pada tahun 1942 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pemohon I

Ratiman
Pemohon II

Nyami

Berdasarkan contoh permohonan itsbat nikah di atas, terlihat bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut dimaksudkan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan Pemohon I dan Pemohon II, dimana pada saat dilakukannya perkawinan tersebut belum ada ketentuan yang berlaku secara khusus tentang perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sebelum berlakunya ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melihat contoh surat permohonan itsbat nikah di atas juga terlihat bahwa tujuan atau kepentingan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah yaitu untuk mengesahkan status anak atau untuk membuat akta kelahiran.

Sedangkan contoh mengenai permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates yang termasuk dalam perkara kontentius dapat dilihat pada uraian permohonan yang peneliti dapatkan dari hasil dokumentasi di Pengadilan Agama Wates, sebagai berikut:

Hal: Pengesahan Nikah

Wates, 28 Juni 2013
Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan
Agama Wates
Di Wates

Assalamu'alaikum wr.wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Wagirah binti Kasimu
Umur : 62
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP
Tempat tinggal : Dusun Gegulu RT 019 RW 009 Desa
Gulurejo Kecamatan Lendah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama : Mistirah binti Kasimu
Umur : 56
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP
Alamat : Dusun Gegulu RT 019 RW 012 Desa
Gulurejo Kecamatan Lendah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Nama : Miskinem binti Kasimu
Umur : 50
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD
Alamat : Dusun Gegulu RT 021 RW 010 Desa
Gulurejo Kecamatan Lendah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

M E L A W A N

Nama : Samiyem binti Kasimu
Umur : 64
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : Tidak Sekolah
Alamat : Dusun Sukamenanti RT 002 RW 003
Kelurahan Penyandingan Kecamatan
Mergopunduh Kabupaten Pesawaran
Lampung Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon III telah memberikan kuasa kepada Pemohon II untuk bertindak atas nama dirinya sendiri dan sekaligus atas nama pemberi kuasa bermaksud

mengajukan permohonan Pengesahan Nikah antara Kasimu dengan Tusiyah.

Adapun permohonan ini didasarkan pada dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami-isteri Kasimu dan Tusiyah yang menikah menurut agama Islam kira-kira pada tahun 1948 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo;
- 2) Bahwa Pemohon tidak mengetahui sama sekali dan tidak pernah mendengar kabar mengenai siapa yang menjadi wali nikah atau saksi-saksi maharnya;
- 3) Bahwa ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunia yakni masing-masing pada tanggal 10 Januari 1991 dan 23 April 2010;
- 4) Bahwa selama pernikahan, ayah dan ibu Pemohon hidup rukun sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Dusun Gegulu RT 021 RW 010 Desa Gulurejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dan mendapatkan 4 (empat) orang anak yakni : Termohon, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
- 5) Bahwa selama hidupnya ayah dan ibu Pemohon belum pernah bercerai, tidak pernah berpindah agama dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahannya;
- 6) Bahwa ayah dan ibu Pemohon sudah pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo, tetapi hilang;
- 7) Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan antara ayah dan ibu Pemohon, sebagaimana Surat Keterangan KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Nomor : KK.12.1.5/PW.01/122/2013 tanggal 14 Juni 2013;
- 8) Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ayah dan ibu Pemohon dari Pengadilan Agama Wates guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk Pembuatan Akta Kematian ayah dan ibu pemohon untuk pembagian warisan;
- 9) Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wates untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara ayah dan ibu Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates segera memeriksa perkara ini,

dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan pernikahan antara Kasimu dan Tusiyah yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo tahun 1948 adalah sah secara hukum;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- 4) Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pemohon

Mistirah

Berdasarkan contoh permohonan itsbat nikah di atas, terlihat bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut dimaksudkan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan ayah dan ibu dari Pemohon dan Termohon, dimana pada saat dilakukannya perkawinan tersebut belum ada ketentuan yang berlaku secara khusus tentang perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan yang dilakukan ayah dan ibu dari Pemohon dan Termohon dilakukan sebelum berlakunya ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melihat contoh surat permohonan itsbat nikah di atas juga terlihat bahwa tujuan atau kepentingan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah yaitu untuk mengurus pembagian warisan.

2. Penerimaan Perkara

Setelah Pengadilan Agama Wates menerima permohonan yang telah diajukan oleh pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan Agama Wates menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah tersebut. Selain menunjuk Majelis Hakim, Ketua juga menunjuk Panitera Sidang untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah tersebut.

Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara itsbat nikah tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua Majelis Hakim kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itsbat nikah tersebut akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis Hakim. Berdasarkan perintah Ketua Majelis, jurusita/jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis.

3. Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah

Pemeriksaan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates dilaksanakan sesuai dengan bentuk perkaranya. Di Pengadilan Agama Wates bentuk perkara itsbat nikah dibedakan menjadi dua yaitu

perkara Voluntair dan perkara Kontentius (Wawancara dengan Bapak Barwanto, S.H, tanggal 25 Oktober 2013).

Perkara Voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Dalam perkara voluntair hanya ada pihak pemohon saja, karena tidak ada sengketa. Sedangkan perkara kontentius adalah perkara gugatan/permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Di dalam perkara kontentius terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa (A. Mukti Arto, 2011: 41-42). Di dalam permohonan itsbat nikah ini terdapat pihak yang mengajukan permohonan disebut Pemohon sedangkan pihak lawan disebut Termohon.

Dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wates dalam wawancaranya bahwa jika permohonan itsbat nikah yang diajukan adalah perkara voluntair/hanya ada Pemohon saja maka pemeriksaan perkara dalam sidang yaitu Pembacaan Permohonan, Pembuktian, Kesimpulan, dan Penetapan Hakim. Sedangkan jika permohonan itsbat nikah yang diajukan adalah perkara kontentius yang di dalamnya terdapat Pemohon dan pihak lawan (Termohon) maka pemeriksaan perkara itsbat nikah tersebut melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Pembacaan permohonan

Pada tahap pembacaan permohonan ini terdapat beberapa kemungkinan dari pemohon yaitu:

1. Mencabut permohonan
2. Mengubah permohonan
3. Mempertahankan permohonan

Jika pemohon tetap mempertahankan permohonannya maka sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu jawaban termohon.

b. Jawaban termohon

Setelah permohonan dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon kemudian termohon diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya, baik dalam sidang itu juga atau dalam sidang berikutnya. Termohon dapat mengajukan jawaban secara tertulis atau lisan. Di dalam mengajukan jawaban tersebut termohon harus hadir secara pribadi dalam sidang atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

c. Replik pemohon

Setelah termohon menyampaikan jawabannya, kemudian si pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapatnya.

d. Duplik termohon

Setelah pemohon menyampaikan repliknya, kemudian termohon diberi kesempatan untuk menanggapi pula. Acara replik dan duplik

(jawab-menjawab) ini dapat diulangi sampai ada titik temu antara pemohon dan termohon, dan/atau dianggap cukup oleh hakim.

e. Pembuktian

Pada tahap ini, baik pemohon maupun termohon diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh hakim.

f. Kesimpulan

Pada tahap ini, baik pemohon maupun termohon diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pandangan masing-masing.

g. Keputusan Hakim

Pada tahap ini, hakim merumuskan duduknya perkara dan pertimbangan hukum (pendapat hakim) mengenai perkara tersebut disertai alasan-alasannya dan dasar-dasar hukumnya, yang diakhiri dengan keputusan hakim mengenai perkara yang diperiksanya itu.

Proses pemeriksaan perkara itsbat nikah tersebut dilakukan di depan sidang setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak dalam mediasi. Pada proses mediasi para pihak diwajibkan untuk hadir dalam persidangan (Wawancara dengan Bapak Barwanto, S.H, pada tanggal 25 Oktober 2013).

Produk Hakim dari hasil pemeriksaan perkara itsbat nikah di persidangan juga berbeda. Untuk perkara voluntair disebut penetapan sedangkan untuk perkara kontentius disebut putusan. Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Penetapan ialah juga pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair (A. Mukti Arto, 2011: 251).

Waktu terselesainya perkara itbat nikah juga berbeda. Untuk perkara voluntair hanya sekitar dua atau tiga kali sidang. Sedangkan untuk perkara kontentius bisa lebih dari penyelesaian perkara voluntair karena terdapat dua pihak yang berperkara (Wawancara dengan Bapak Barwanto, S.H pada tanggal 25 Oktober 2013).

Terhadap pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates yang termasuk dalam perkara voluntair ada salah satu contoh yang peneliti dapatkan dari hasil dokumentasi di Pengadilan Agama Wates dengan perkara Nomor: 0023/Pdt.P/2013/PA.Wt.

a. Pokok Perkara

Bapak Warsihana (Pemohon) adalah anak sah dari pasangan suami isteri Bapak Harjo Dinomo alias Sandriyo dengan Ibu Sawiyem yang menikah menurut Hukum Islam diperkirakan pada

tahun 1948 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo. Pemohon tidak mengetahui sama sekali dan tidak pernah mendengar kabar mengenai siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi maupun maharnya, namun saat ini saudara dari orang tua Pemohon masih ada yang hidup dan menyaksikan pernikahan orang tua Pemohon. Selama perkawinan, ayah dan ibu Pemohon telah memiliki satu orang anak yakni Pemohon. Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1958 sedangkan ibu Pemohon juga telah meninggal dunia pada tahun 1969 dan selama perkawinannya keduanya belum pernah bercerai maupun berpindah agama selain Islam (murtad).

Menurut keterangan Bapak Mangun yakni saudara Ibu Sawiyem, bahwa ayah dan ibu Pemohon saat pernikahan tersebut pernah dicatatkan melalui Balai Desa Bojong dan KUA Panjatan, namun setelah dicari duplikat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjatan data tersebut tidak ada. Pemohon saat ini sedang mengurus proses pensertifikatan hak waris dari almarhum Bapak Harjo Dinomo alias Sandriyo dengan almarhum Ibu Sawiyem yang masih Letter C dan masih indung dengan Letter C atas nama almarhum Bapak Kasan Dimejo alias Sandriyem yang merupakan adik dari almarhum Bapak Harjo Dinomo alias Sandriyo di Balai Desa Bojong Kecamatan Panjatan dan Kantor Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Kulon Progo. Perkara waris ini belum bisa selesai dikarenakan Pemohon belum melengkapi alat bukti guna mendukung pengurusan pembagian hak waris di Balai Desa Bojong dan BPN Kulon Progo.

b. Proses Pemeriksaan Perkara

Pada saat persidangan Pemohon dan atau Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa ayah kandung dari Bapak Harjo Dinomo (Alm) adalah Singo Karto (Alm) sedangkan nama ayah kandung dari ibu Sawiyem (Alm) adalah Karso Iromo (Alm).

Dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3276011212500004 atas nama Pemohon (Warsihana) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 09-12-2010 yang diberi kode P.1, fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Nomor 1493/200/12/1974 tanggal 30 Desember 1974 yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi yang diberi kode P.2, fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon

dengan Nomor 3276010411070057 tanggal 09-06-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang diberi kode P.3, fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo dengan Nomor Kk.1201.3/PW.01/041/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang diberi kode P.4, fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah dengan Nomor 221/STTB/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Dondong Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo tanggal 13-10-1986 yang diberi kode P.5, fotocopy STTB SMP dengan Nomor 01 OA ob P 0000640 yang dikeluarkan oleh Panitia Ujian Persamaan SMP Kanwil Depdikbud Prop DKI Jakarta tanggal 17 Februari 1991 yang diberi kode P.6, fotocopy Surat Pernyataan kesepakatan pembagian waris yang dibuat tanggal 20 Juni 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo yang diberi kode P.7.

Selain itu Pemohon telah menghadirkan tiga orang saksi yaitu Sastro Wiharjo bin Amat Muat, Ngadimun bin Amat Rosidi, dan Dwi Ananda S.E bin Dalil Sumo Raharjo. Mereka telah memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi Sastro Wiharjo bin Amat Muat kenal dengan orang tua Pemohon yaitu Bapak Harjo Dinomo dan Ibu Sawiyem, sepengetahuan saksi Sastro Wiharjo bin Amat Muat Bapak Harjo Dinomo dan Ibu

Sawiyem adalah suami-isteri yang sah, saksi Sastro Wiharjo bin Amat Muat mengetahui bahwa setelah menikah Bapak Harjo Dinomo dan Ibu Sawiyem hidup sebagai suami-isteri di Desa Bojong Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo dan dikaruniai seorang anak bernama Warsihana yaitu Pemohon, saksi Sastro Wiharjo bin Amat Muat mengetahui bahwa Bapak Harjo Dinomo meninggal sekitar tahun 1958 sedangkan Ibu Sawiyem meninggal tahun 1969, lalu sepeninggal orang tuanya, Pemohon merantau ke Jakarta hingga sekarang, sedangkan saksi Ngadimun bin Amat Rosidi dan Dwi Ananda, S.E bin Dalil Sumo Raharjo mengetahui dari orang tua mereka karena pada waktu itu mereka masih kecil bahkan belum lahir, ketiga saksi mengetahui bahwa maksud diajukannya itsbat nikah yaitu untuk bukti dalam rangka mengurus pembagian warisan.

Dalam tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan.

c. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Agama Wates adalah:

- 1) Bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan itsbat nikah atas pernikahan kedua orang tuanya bernama Haro Dinimo alias

Sandriyo bin Singo Karto (Alm) dan Sawiyem binti Karrso Irono (Alm);

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;
- 4) Bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon, alat bukti, dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan sesuai Syari'ah Islam antara Harjo Dinomo alias Sandriyo bin Singo Karto (Alm) dengan Sawiyem binti Karso Irono (Alm) pada sekitar tahun 1948 di Desa Bojong, wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menurut pendapat Majelis dapat dikategorikan sebagai keterangan yang didasarkan pada berita yang tersiar secara luas di masyarakat (khabar yang

masyhur) yang dalam ilmu fiqh dikenal dengan *al-syahadah bil-istifadhah*;

- 6) Bahwa dari pernikahan tersebut Harjo Dinomo alias Sandriyo bin Singo Karto (Alm) dengan Sawiyem binti Karso Irono (Alm) telah mempunyai seorang anak bernama Warsihana bin Harjo Dinomo, yakni Pemohon;
 - 7) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengingat ketentuan pasal 125 HIR, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
 - 8) Bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.
- d. Penetapan Pengadilan

Dalam perkara ini setelah melihat fakta-fakta yang ada dan berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil maka Pengadilan Agama Wates telah mengadili dan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan sah perkawinan antara Harjo Dinomo alias Sandriyo bin Singo Karto (Alm) dengan Sawiyem

binti Karso Irono (Alm) yang dilaksanakan pada tahun 1948 di Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo, dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Dalam perkara tersebut telah terjadi pernikahan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut karena setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ternyata tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perkawinan yang berlaku dan pengkuan dari pemohon, alat bukti, keterangan saksi-saksi dapat diambil kesimpulan bahwa memang telah terjadi pernikahan antara ayah dengan ibu pemohon pada tahun 1948. Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti atas pernikahan orang tuanya karena untuk mengurus pembagian warisan. Menurut peneliti pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah baik sesuai dengan tahap-tahapnya dari awal hingga akhir yaitu dari proses pembacaan permohonan hingga penetapan. Pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim juga telah sesuai karena telah berdasarkan pada fakta-fakta yang ada, ilmu fiqh, Undang-Undang yang berlaku, dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon”. Akan tetapi, dalam penyelesaian perkara Nomor: 0023/Pdt.P/2013/PA.Wt. sebagai contoh di atas dikategorikan sebagai perkara voluntair yang produknya berupa penetapan. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Di dalam perkara tersebut seharusnya penyelesaian perkara dikategorikan secara kontentius karena diajukan oleh anak dari orang tua yang pernikahannya akan diitsbatkan. Selain itu, terdapat pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam perkara pengesahan nikah tersebut yang seharusnya dijadikan sebagai pihak.

Selanjutnya terhadap pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates yang termasuk dalam perkara kontentius ada salah satu contoh yang peneliti dapatkan dari hasil dokumentasi di Pengadilan Agama Wates dengan perkara Nomor: 0314/Pdt.G/2013/PA.Wt.

a. Pokok Perkara

Ibu Wagirah (Pemohon I), Ibu Mistirah (Pemohon II), Ibu Miskinem (Pemohon III) dan Ibu Samiyem (Termohon) adalah anak sah dari pasangan suami isteri Kasimu dan Tusiyah yang menikah menurut agama Islam kira-kira pada tahun 1948

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo. Namun Pemohon tidak mengetahui sama sekali dan tidak pernah mendengar kabar mengenai siapa yang menjadi wali nikah atau saksi-saksi maharnya. Ayah dan ibu pemohon telah meninggal dunia yakni pada tanggal 10 Januari 1991 dan 23 April 2010.

Selama pernikahan, ayah dan ibu pemohon hidup rukun sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di Dusun Gegulu RT 021 RW 010 Desa Gulurejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dan mendapatkan 4 (empat) orang anak yakni : Termohon, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III. Selama hidupnya ayah dan ibu pemohon belum pernah bercerai, tidak pernah berpindah agama dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahannya. Ayah dan ibu pemohon sudah pernah memiliki Buku Nikah dari KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo, tetapi hilang. Pemohon telah mendatangi KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan antara ayah dan ibu pemohon, sebagaimana Surat Keterangan Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Nomor : KK.12.1.5/PW.01/122/2013 tanggal 14 Juni 2013. Pada saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ayah dan ibu pemohon dari Pengadilan Agama

Wates guna dijadikan sebagai dasar hukum pembuatan akta kematian ayah dan ibu pemohon, serta akta kelahiran para pemohon guna mengurus pembagian warisan.

b. Proses Pemeriksaan Perkara

Pada saat persidangan pemohon hadir sendiri sedangkan termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 0314/Pdt.G/2013/PA.Wt. tanggal 16 Agustus 2013 melalui Radio Suara Pasar yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan patut oleh Syafii Ma'arif jurusita pengganti Pengadilan Agama Wates, oleh karena itu termohon tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena Termohon tidak hadir, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Dalam tahap pembuktian pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3401054203510001 atas nama Pemohon I (Wagirah) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 20 Oktober 2012 yang diberi kode P.1, fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3401054811580003 atas nama Pemohon II (Mistirah) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 20 Oktober 2012 yang diberi kode P.2, fotocopy Kartu Tanda

Penduduk NIK 3401057112630019 atas nama Pemohon III (Miskinem) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 20 Oktober 2012 yang diberi kode P.3, asli surat keterangan Nomor: KK.12.05.5/PW.01/13/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo tanggal 26 Juni 2013 yang diberi kode P.4.

Kemudian fotocopy kutipan akta kematian atas nama SONTANI/KASIMU Nomor: 3401-KM-09092013-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 09 September 2013 yang diberi kode P.5, fotocopy kutipan akta kematian atas nama TUSIYAH/ NY SONTANI Nomor : 3401-KM-09092013-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 09 September 2013 yang diberi kode P.6, asli surat keterangan dari Kepala Desa Gulurejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 474/425/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang diberi kode P.7.

Selain itu pemohon telah menghadirkan tiga orang saksi yaitu Mujiyem binti Pawiro Ikromo, Robiyatin bin Abdullah Rosadi, dan Walkito bin Atmo Inangun. Mereka telah memberikan keterangan bahwa mereka kenal dengan para pemohon dan termohon, mereka kenal dengan orang tua pemohon dan termohon

yaitu Kasimu alias Sontani dan Tusiyah, mereka mengetahui bahwa orang tua para pemohon dan termohon adalah suami isteri yang telah menikah tetapi tidak ada buku nikahnya, mereka mengetahui bahwa telah terjadi pernikahan orang tua para pemohon dan termohon dari cerita masyarakat sekitar, mereka mengetahui bahwa hasil pernikahan orang tua para pemohon dan termohon telah dikaruniai empat orang anak yakni Wagirah (Pemohon I), Mistirah (Pemohon II), Miskinem (Pemohon III) dan Samiyem (Termohon), mereka mengetahui bahwa sampai meninggal dunia ayah dan ibu pemohon dan termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan mereka mengetahui bahwa orang tua para pemohon dan termohon telah meninggal dunia.

c. Pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Agama Wates adalah:

- 1) Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah pemohon adalah untuk membuat akta kelahiran guna mengurus warisan orang tuanya;
- 2) Bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak

ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

- 3) Bahwa para pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinan orang tua para Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1948 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, orang tua para Pemohon dan Termohon pernah mendapatkan bukti nikah namun sekarang hilang. Permohonan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk membuat akta kelahiran guna mengurus pembagian warisan;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;
- 6) Bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon, alat bukti, dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan sesuai Syari'ah Islam

antara Kasimu dengan Tusiya pada sekitar tahun 1948 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo;

- 7) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menurut pendapat Majelis dapat dikategorikan sebagai keterangan yang didasarkan pada berita yang tersiar secara luas di masyarakat (khabar yang masyhur) yang dalam ilmu fiqh dikenal dengan *al-syahadah bil-istifadhah*;
- 8) Bahwa dari pernikahan tersebut Kasimu dan Tusiya telah mempunyai 4 orang anak yakni Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Termohon;
- 9) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengingat ketentuan pasal 125 HIR, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;
- 10) Bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

d. Putusan Pengadilan

Dalam perkara ini setelah melihat fakta-fakta yang ada dan berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil maka Pengadilan Agama Wates telah mengadili dan menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek, menyatakan sah pernikahan antara ayah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Termohon (Kasimu) dengan ibu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Termohon (Tusiyah) yang dilaksanakan pada tahun 1948 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo, memerintahkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Termohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo, dan membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Dalam perkara tersebut telah terjadi pernikahan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut karena setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ternyata tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perkawinan yang berlaku dan pengkuan dari pemohon, alat bukti, keterangan saksi-saksi dapat diambil kesimpulan bahwa memang telah terjadi pernikahan antara

ayah dengan ibu pemohon pada tahun 1948. Para pemohon sangat membutuhkan adanya bukti atas pernikahan orang tuanya karena untuk membuat akta kelahiran guna mengurus pembagian warisan. Menurut peneliti pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah baik sesuai dengan tahap-tahapnya dari awal hingga akhir yaitu dari proses pembacaan permohonan hingga putusan. Pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim juga telah sesuai karena telah berdasarkan pada fakta-fakta yang ada, ilmu fiqh, Undang-Undang yang berlaku, dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon”. Di dalam penyelesaian perkara Nomor: 0314/Pdt.G/2013/PA.Wt. sebagai contoh di atas telah dikategorikan sebagai perkara kontentius yang produknya berupa putusan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Mahkamah Agung.